



Buletin Parlementaria

Nomor 977/III/IX/2017 • September 2017



**Parlemen Berperan
Berantas Korupsi**

**Ngeri-Ngeri Sedap,
Catatan Kritis
Ketua Komisi III DPR**

**DPR Desak KPK
Perbaiki Prosedur
Penyadapan**

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**

DPR Desak KPK Perbaiki Prosedur Penyadapan

Komisi III DPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki prosedur penyadapan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.



Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedyta Panjaitan berdialog dengan pimpinan KPK

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, masih ada konten dalam penyadapan yang tidak terkait dengan pokok perkara, namun masuk ke pengadilan, dan kemudian tersiar ke ruang publik.

“Bagaimana ke depan, kami mendorong KPK memperbaiki yang kurang sempurna, misalnya terkait penyadapan,” kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisioner KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman (F-PD).

Politisi F-PG itu mengatakan, Komisi III DPR memiliki tanggung jawab terhadap kinerja KPK. Peralunya, para pimpinan KPK merupakan pilihan dan telah melewati fit and proper test di Komisi III DPR.

“Karena itu suksesnya pimpinan KPK ke depan adalah suksesnya Komisi III DPR yang memilih. Tapi kalau ada kegagalan, kami tidak bisa lepas

tanggung jawab,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, KPK kerap kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap kali lembaga antirasuah itu mendapatkan tekanan. Padahal, dalam salah satu ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, batas minimal besaran yang bisa ditangani Rp 1 miliar.

“Ada yang bertanya, OTT jumlahnya tak signifikan. Setiap KPK mendapat tekanan, maka KPK melakukan OTT. Ini yang kita lihat. Apakah ini cara untuk mendapatkan simpati publik?” kata politisi F-PKS itu seolah bertanya.

Nasir juga menyinggung pemanggilan saksi oleh KPK yang terekspos ke publik. Ia mencontohkan, ada seorang kepala daerah merasa malu karena dipanggil KPK. “Pengalaman beberapa orang yang dipanggil jadi saksi dan terekspos media itu anaknya malu, istrinya malu. Ada juga

kepala daerah di Sumatera, saat dipanggil malu saat salat di masjid dekat rumahnya,” papar Nasir.

Untuk itu, ia meminta KPK menjaga sisi proporsionalitasnya dan profesional dalam menjalani prosedur hukum dan tetap menganut asas praduga tak bersalah. Sisi proporsional itu harus dijaga, agar semuanya tunduk pada pimpinan KPK.

“Saya ingin ingatkan karena KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna. Saya berharap apa yang saya sampaikan dipahami pimpinan agar sejak pengaduan masyarakat (Dumas) sampai penuntutan tetap menjaga asas KPK,” tambah politisi asal dapil Aceh itu.

Terkait penyadapan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada mekanisme yang mengaturnya. Dia menjelaskan, penyadapan berawal dari usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang disampaikan ke pimpinan KPK.

Menurut dia, apabila lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), kegiatan baru bisa dilakukan. “Tapi, yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK,” tambah Agus.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto menambahkan, ada tiga kedeputusan di KPK yang terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data (Inda), serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

“Kegiatan penyadapan ini dilakukan tiga kedeputusan, Penindakan sebagai user yang mengirim nomor dan menerima hasilnya nanti, Inda yang melakukan penyadapan, kemudian PIPM yang melakukan audit. Jadi, meskipun Kemenkominfo tidak melakukan audit, kita melakukan audit setiap tiga bulan sekali,” papar Hary.

Hary menegaskan Deputi Inda tidak akan melakukan penyadapan apabila penyidik tidak memberikan surat perintah penyadapan (sprindap) yang telah ditandatangani lima pimpinan KPK. Ia juga menyebut sprindap itu berlaku untuk satu nomor saja. Penyadapan itu disebut dibatasi selama 30 hari. Apabila sudah 30 hari, Hary menyebut mesin akan otomatis berhenti menyadap. ■

(sf) foto: andri/hr



Parlemen Berperan Berantas Korupsi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Global Organization of Parliaments Against Corruption (GOPAC) mendorong semua pihak untuk bersatu melawan korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Disisi lain, Parlemen memiliki peran atau andil besar dalam memberantas korupsi sesuai dengan pelaksanaan Agenda 2030 yang inklusif, transparan dan akuntabel,

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam Annual Meeting Global Organization of Parliaments Against Corruption (GOPAC) di Nusa Dua Bali, Jumat (08/9/2017).

“Yang jelas kita punya komitmen bahwa parlemen turut memiliki andil besar dalam memberantas korupsi karena harus sistematis, mulai dari pencegahan penindakan melalui perannya dalam legislasi, pengawasan dan penganggaran,” tutur Fadli selaku Presiden GOPAC.

Fadli menjelaskan, optimalisasi ketiga fungsi parlemen yaitu legislasi, pengawasan dan kontrol anggaran sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi. Sisi lain, pemberantasan korupsi menjadi syarat penting dalam tercapainya Agenda 2030 pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dia juga menekankan, pentingnya kerja sama antar parlemen untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif. Menurutnya, tanpa kerja sama dari seluruh pihak, termasuk parlemen dunia, maka pembangunan inklusif akan sulit terwujud. “Kerja sama parlemen akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi yang

menjadi target SDGs,” jelas Fadli.

Sebelumnya, dalam partner session World Parliamentary Forum, GOPAC bermitra dengan UNDP, UNODC memperkenalkan A Parliamentary Handbook: Parliament’s Role in Implementing the SDGs. GOPAC sepakat bahwa parlemen adalah salah satu aktor penting dalam implementasi SDGs dan berkomitmen menggunakan buku tersebut sebagai panduan di negara masing-masing.

Pertemuan yang dihadiri delegasi parlemen dari berbagai negara tersebut, juga membahas rencana pemilihan presiden GOPAC dan Komite Eksekutif periode 2018 – 2020. Saat ini, salah satu kandidat terkuat untuk Presiden GOPAC masih dipegang DPR RI dengan kembali mengusung nama Fadli Zon untuk periode ke-2. “Sebagian besar mendorong saya untuk mencalonkan lagi sebagai Presiden GOPAC,” katanya.

Untuk bisa menjadi calon presiden GOPAC, seseorang harus dicalonkan di negaranya (national chapter) terlebih dulu, kemudian ke regional chapter. Pengusulan itu harus ditandatangani oleh masing-masing regional chapter seluruh benua dan minimal disetujui 3 negara sebagai syarat dukungan pencalonan. ■

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Foka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E., Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

(Irm). Foto: Chasbi/hr



Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

DPR Setujui Konvensi Minimata

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. RUU ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta melindungi generasi bangsa Indonesia dari Merkuri.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam laporannya menjelaskan bahwa merkuri atau yang biasa disebut raksa adalah unsur kimia salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Merkuri dikenal sebagai suatu bahan yang menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap syaraf dan dampak kesehatan lainnya. Terutama sangat membahayakan bagi janin dan balita.

“Emisi dan lepasan merkuri ke

lingkungan hidup akan masuk ke dalam rantai makanan, dan akan terakumulasi dalam tubuh manusia. Bila kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus, maka dapat menyebabkan terancamnya derajat kesehatan dan kualitas SDM saat ini maupun di masa yang akan datang,” kata Gus Irawan, pada Rapat Paripurna, Kamis, (14/9/2017)

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, penggunaan merkuri di Indonesia terjadi pada kegiatan pertambangan, industri dan kesehatan. Di bidang pertambangan,

khususnya pada pertambangan emas skala kecil, untuk kegiatan pemurnian emas. Pada laporan Global Mercury Assesment yang dikeluarkan United Nation Enviromental Program (UNEP) pada 2013, pertambangan emas skala kecil oleh masyarakat merupakan sumber emisi terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja.

“Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan terdapat pertambangan emas skala kecil dilakukan oleh rakyat di 32 provinsi dan di 197 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia,” jelas Gus Irawan.

Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional pada tahun 2009, UNEP menyelenggarakan Governing Councils yang menghasilkan resolusi tentang pembentukan Intergovernmental

Negotiating Committee (INC) on Legally Mining Instrument on Mercury, yang bertujuan membentuk aturan internasional tentang pengaruh merkuri secara global.

Dalam proses penyusunannya, Indonesia juga turut berperan aktif, mulai dari INC pertama di Stockholm pada 2010 hingga INC kelima pada tahun 2013 di Jenewa yang menyetujui substansi konvensi dan menyetujui nama konvensi Minimata Convention on Mercury atau Konvensi Minimata mengenai Merkuri.

“Konvensi Minimata mengatur mengenai pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk pertambangan merkuri, dan penggunaannya sebagai bahan tambahan dalam produk dan produksi, serta penggunaan dalam tambang emas skala kecil,” tambah Gus Irawan.

Konvensi Minimata sendiri telah ditandatangani oleh 92 negara di Jepang pada 10 Oktober 2013. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani, namun sampai saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut.

“Melalui pengesahan Konvensi Minimata, Indonesia akan memperoleh manfaat, diantaranya memberikan dasar bagi negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat. Dan menjaga kesehatan serta melindungi generasi mendatang dari dampak negatif merkuri,” tambah Gus Irawan.

Kemudian, masih kata Gus Irawan, dengan adanya konvensi ini juga dapat memperkuat pengendalian pengadaan, distribusi dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri. Serta meningkatkan kerjasama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama pengganti merkuri, khususnya dalam tambang emas skala kecil.

“Dalam pembahasan di Komisi VII, sembilan fraksi menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi Minimata mengenai Merkuri. Sementara F-PKS menyampaikan persetujuannya secara tertulis. Komisi VII bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi UU,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sebagai pimpinan rapat pun menanyakan persetujuannya kepada seluruh peserta rapat yang hadir. Jawaban “setuju” pun didengarkan seluruh peserta rapat. ■

(sf/sc), Foto: Jaka/hr

B to B Skema Penyelesaian Korban Lumpur Lapindo Gagal

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, mekanisme Bussines to Bussines merupakan salah satu skema dalam penyelesaian korban lumpur Lapindo yang berada dalam peta area terdampak Lumpur Lapindo. Namun dalam pelaksanaannya mekanisme B to B gagal karena tidak mampu mengakomodir semua pihak.

“Harus ada diskresi atau kebijakan khusus dari pemerintah yang sekarang menguasai peta area terdampak untuk membuat langkah-langkah seperti dana talangan untuk para pengusaha yang pabriknya atau masyarakat yang berada di area terdampak,” paparnya.

Terkait masyarakat yang berada di dalam peta area terdampak, lanjut politisi PKS ini, jangan dipilah-pilah antara pengusaha dan masyarakat umum, semuanya satu entitas. “Sehingga kalau ada dana talangan untuk korban lumpur yang berada di dalam peta area terdampak harus dianggap sebagai hak mereka semua dan harus dibagi secara profesional antara pengusaha dan masyarakat. Karena pengusaha juga adalah masyarakat,” jelas Sigit saat pertemuan Tim Komisi V DPR dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Irjen Kementerian PUPR Ridho Ananda Anwar, Kepala PPLS Dwi Sugiyanto, dan pengusaha korban lumpur Lapindo di Kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur,

Kamis (7/9/2017) malam.

Oleh karena itu, tegas Politisi Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini, Komisi V akan mencoba membangun konstruksi hukum untuk lebih memudahkan agar pemerintah tidak salah dalam memberikan dana talangan kepada korban lumpur Lapindo yang berada di peta area terdampak.

“Kalau perlu sampai pada tingkat tuntas, menuntaskan penyelesaian persoalan. Tentu ini memerlukan dana yang cukup. Itu gunanya kita mengadakan rapat ini untuk menyusun bagaimana landasan-landasan hukumnya,” paparnya.

Sigit mengatakan, DPR sebagai pemegang hak Budgeting akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Lapindo secara cepat.

Sebagaimana diketahui masalah lumpur Lapindo ini sudah berjalan selama 11 tahun. Sigit berharap masalah segera selesai. Dan jika persoalan ini selesai, tambahnya, merupakan sebuah prestasi besar bagi pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini. ■



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

(sc/sf), foto: suci/hr

RUU Terrorisme Akomodir Perspektif Gender

Anggota Pansus RUU Terrorisme DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terrorisme akan mengakomodir perspektif gender atau keterlibatan perempuan, baik sebagai pelaku maupun korban gerakan terorisme.

“Akhir-akhir ini makin banyak perempuan di dalam maupun luar negeri yang menjadi pelaku terorisme.

Bahkan siap meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri seperti Dian Yulia Novi yang akan meledakkan diri di Istana Presiden di akhir 2016,” tegas Bobby dalam diskusi ‘Perempuan dalam Radikalisme dan Terrorisme’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Bobby hadir bersama direktur C-Save Mira Kusumarini dan Kepala Bidang Rehabilitasi Vokasional Kementerian Sosial RI Neneng Ratnaningsih.

Bobby mengatakan, perempuan semakin banyak dimanfaatkan sebagai subyek gerakan teroris. Perempuan banyak menjadi mortir atau kombatan teroris. Seperti di Boko Haram, Afrika, Irlandia Utara bahkan Indonesia.

“Mengapa? Sebab, perempuan mudah dipengaruhi dengan doktrinasi ideologi radikal karena tak memiliki akses pengetahuan keagamaan ke luar kelompoknya, situs sebagai sumber informasi keagamaan juga dari kelompok mereka saja, sehingga mudah menjadi radikal,” paparnya.

Selain itu berbagai macam modus digunakan komplotan terorisme untuk merekrut perempuan, seperti mengikuti suami ke Suriah dengan alasan pernikahan padahal sebagai upaya untuk merekrut teroris perempuan.

Karena itu, Bobby menambahkan, untuk mencegah penyebaran ajaran radikalisme tersebut telah dilakukan Fatayat NU dengan menugaskan 1.000 kader untuk memberi ceramah di tengah masyarakat. “Jadi, gender ini materi baru dalam RUU Terrorisme. Di draft pemerintah pun belum ada draft gender, sehingga harus diakomodir,” ucapnya.

Direktur C-Save Mira Kusumarini



Anggota Pansus RUU Terrorisme DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi

berpandangan, selama ini perumusan RUU Terrorisme belum memiliki perspektif gender, sehingga cenderung mengabaikan posisi perempuan. Padahal, perempuan memiliki posisi strategis dalam isu ‘Countering Violent Extremism atau anti terorisme’.

“Perempuan bisa menjadi pelaku maupun korban. Disebut sebagai korban akibat ketidaktahuan akan aktivitas terorisme pasangannya dan memungkinkan mereka menerima hukuman berat seperti hukuman mati tanpa pertimbangan khusus,” tutur Mira.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Vokasional Kemensos RI Neneng Ratnaningsih melaporkan, terdapat 161 deportant dari luar negeri seperti Suriah, Turki, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam terdiri dari 43 perempuan dan 79 anak-anak berusia sekolah. Ada yang

berasal dari Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sedangkan yang terbesar direhabilitasi Kemensos RI adalah berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk mengurangi paham radikal, Kemensos RI melakukan pendampingan selama 24 jam. “Semula mereka menganggap semua yang di luar adalah kafir. Jangankan menjawab salam, melihat kita saja mereka tak mau,” jelas Neneng. ■

(am/sc), foto : jeka/hr

Sekjen DPR Apresiasi 136 Peserta Parlemen Remaja 2017

Sekretaris Jendral DPR RI Achmad Djuned menyampaikan apresiasi positif kepada 136 peserta terbaik parlemen remaja 2017 yang mewakili Sekolahnya masing-masing.

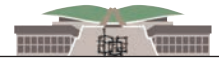
“Saya sangat bangga, karena bisa bertemu secara langsung dengan 136 perwakilan remaja dari 34 provinsi. Adik-adik merupakan orang terpilih, dari 6800 yang mendaftar kalian yang berhasil sampai di sini,” ungkap Djuned disambut tepuk tangan meriah peserta parlemen remaja di Wisma DPR RI Kopo, Bogor, Selasa (12/9/2017).

Dalam sambutannya, Djuned juga menjelaskan bahwasanya Parlemen Remaja merupakan amanah dari asosiasi

parlemen dunia, International Parliamentary Union (IPU).

“Diamanahkan setiap anggota IPU bisa memberikan pendidikan politik kepada generasi muda dengan berbagai kegiatan. DPR sebagai salah satu peserta IPU menjalankan amanah itu dengan menyelenggarakan Parlemen Remaja yang sudah dimulai sejak tahun 2008,” jelasnya.

Lebih lanjut, Djuned menjelaskan bahwa pendidikan politik sebenarnya merupakan tanggung jawab partai politik



DPR Sahkan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas 2017

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Tahun 2015 – 2019. Sebanyak 4 RUU yang disepakati masuk dalam RUU Prioritas 2017 dan 2 RUU tambahan ke dalam Prolegnas 2015-2019.

Wakil Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, DPR bersama pemerintah telah melakukan rapat koordinasi evaluasi prolegnas. Pertemuan tersebut menyepakati untuk mempercepat pembahasan RUU yang ditangani Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga target pembentukan UU dapat diselesaikan tepat waktu.

Firman mengakui, belum optimalnya penyelesaian pembentukan UU karena kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pada saat pembahasan.

Untuk mengoptimalkan capaian legislasi, dalam rapat koordinasi disepakati 4 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017, antara lain: RUU tentang Sumber Daya Air usulan Komisi V, RUU

tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik usulan Komisi X, RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial usulan Komisi VIII, dan RUU tentang Konsultan Pajak usulan anggota.

“RUU ini diperlukan untuk mendukung peran konsultan pajak sebagai mitra strategis otoritas pajak guna meningkatkan penerimaan pajak maupun self assessment bagi wajib pajak,” tutur Firman

Sementara, 2 RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas Tahun 2015 – 2019, yaitu RUU tentang Permusikan dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat.

Menurut Firman, RUU Permusikan diperlukan dalam tata kelola musik dari hulu sampai hilir, sedangkan RUU tentang Hak atas Tanah Adat memiliki urgensi untuk perlindungan dan pengakuan oleh negara terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat adat.



Wakil Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo

Namun, substansi RUU tentang Hak atas Tanah Adat usulan DPD RI ini hampir sama dengan RUU tentang Masyarakat Adat yang sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg. “Karena itu, seandainya substansi hak atas tanah adat sudah diatur dalam RUU tentang Masyarakat Adat yang sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg, maka usulan RUU dari DPD akan dikeluarkan/ dihapus dalam Prolegnas Tahun 2015-2019,” tutup politisi Golkar ini. ■

(ann/sc), foto:naelurocijhr



Sekretaris Jendral DPR RI Achmad Djuned

dalam mendidik dan membina kader namun dalam realita, hal tersebut belum optimal. Oleh karena itu, Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah IPU dalam memberikan pendidikan politik sejak dini. Untuk mendidik, dan memberikan pemahaman mengenai dinamika politik secara nasional.

“Dalam kegiatan ini, kami memberikan simulasi serta pemahaman bagaimana DPR sebagai lembaga politik menjalankan peran dan fungsinya di dalam bernegara,” tandasnya.

Tema kali ini yang diangkat adalah ‘Peran Parlemen Dalam Menyelamatkan Generasi Muda Dari Ancaman Narkotika’. Melihat tema tersebut, Djuned mengatakan DPR memiliki

peran yang sangat strategi dalam menyelamatkan generasi muda.

“Fungsi legislasi DPR akan membuat regulasi untuk bisa menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Sisi anggaran, DPR berperan besar dalam menentukan APBN untuk hal yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan obat terlarang. Fungsi terakhir yaitu pengawasan, baik mengawasi anggaran maupun kebijakan pemerintah. Oleh karena itu tema ini sangat tepat diangkat dalam tugas dan fungsi DPR,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Djuned sangat berharap para peserta memiliki pemahaman lebih mengenai DPR serta mengetahui akan bahaya narkoba.

“Kegiatan ini bisa menambah pengetahuan adik-adik karena adanya simulasi, orientasi serta pemahaman mengenai fungsi dan tugas DPR, serta pemahaman akan bahaya narkoba,” tutupnya seraya mengetuk palu tanda orientasi pembekalan kepada peserta parlemen remaja dibuka. ■

(imm/sc), Foto : jayadijhr

Hutan Lindung Harus Steril dari Hutan Desa

Kawasan hutan lindung harus steril dari perambahan atau pembukaan lahan baru bagi aktivitas manusia. Program membuka hutan desa di dalam kawasan hutan lindung mengancam kelestarian ekosistem hutan. Kekayaan flora dan fauna hutan tak boleh diganggu. Apalagi, hutan juga bisa jadi sumber bahan baku pembuatan obat-obatan.



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (13/9/2017). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Bambang menegaskan, DPR menentang keras Program pemerintah yang membolehkan membuka hutan lindung untuk hutan desa karena dapat berakibat rusaknya ekosistem di wilayah tersebut. "Kami sangat keberatan, karena jumlah hutan lindung kita sangat sedikit. Harusnya steril dari penggunaan apapun untuk manusia. Kita punya flora fauna di dalamnya yang tidak boleh diganggu

ekosistemnya. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan pariwisata kalau ekosistem hutan bisa dipertahankan," tutur Anggota Komisi VI tersebut.

Dirinya juga mengkhawatirkan, apabila hutan desa berdiri di tengah hutan lindung, dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan. Pada kesempatan tersebut, Politisi Partai Gerindra tersebut, mengkritik aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing dengan pemboman. Apalagi, selama ini KKP kerap menenggelamkannya dekat dengan garis pantai. Hal tersebut dapat merusak ekosistem laut dan melanggar aturan International Maritime Organization (IMO) dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dari PBB.

Penenggelaman kapal, lanjut Bambang, bisa dilakukan pada jarak 16 mil laut. Untuk itu, ia mendesak Menteri KLH memberi masukan kepada Menteri KP agar tak lagi menenggelamkan kapal dengan mengebom dekat pesisir pantai. "Penenggelaman boleh seperti dilakukan Australia di laut dalam. Itu pun tidak diledakkan. Pengeboman bisa mengotori laut, menimbulkan polusi, dan merusak ekosistem," kilah politisi dari dapil Jatim I.

Bambang lalu mencontohkan, pemboman kapal di Pangandaran, Jawa Barat, telah merusak ekosistem laut. Saat diledakkan, kapal tidak pecah seluruhnya dan ternyata kapal tersebut juga masih menyimpan 100 ton bahan bakar. Akhirnya, laut pun tercemar oleh tumpahan bahan bakar. ■

(mh,mp), foto: jeka/hr



Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan lingkungan Gunung Tujuh di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terkait adanya pro dan kontra mengenai penambangan batu granit yang dilakukan di kawasan itu.



Komisi IV Akan Tindaklanjuti Permasalahan Lingkungan Gunung Tujuh

“Tentu kita akan menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik Komisi IV ini kepada kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelas Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Kamis (7/9/2017).

Dalam kunjungan itu, Komisi IV menyerap aspirasi masyarakat, baik

yang pro maupun yang kontra. Turut serta belasan Anggota Komisi IV DPR RI dengan didampingi Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dilanjutkan Daniel, pemerintah harus mengkaji hal ini karena menurutnya sumber air yang ada di antara Gunung Tujuh ini sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat

setempat. “Hutan yang lebat ini menjadi sumber air untuk satu kecamatan, tapi mau dihancurkan. Sementara pemerintah selalu berusaha agar bagaimana mengatasi kekeringan di sejumlah daerah dengan menyiasati agar bisa tumbuh sumber-sumber air baru,” lanjutnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diakui Daniel lahan pertanian masyarakat juga sangat bergantung dengan sumber air yang ada. “Lahan pertanian di Kecamatan Teluk Batang akan hancur tanpa pengairan jadi kita harus menyelamatkan sumber kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kayong Utara dikatakan Daniel, bahwa Kecamatan Teluk Batang merupakan kawasan Cagar Budaya, sehingga dengan izin yang memperbolehkan kawasan Gunung Tujuh sebagai lokasi pertambangan, diakui Daniel sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan di dalam Perda.

Selain masalah sumber air dan lokasi Gunung Tujuh yang merupakan kawasan cagar budaya, diakui Daniel pihak perusahaan juga tidak melibatkan masyarakat setempat dalam sosialisasi masuknya pertambangan di daerah mereka.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan terhadap izin yang dikeluarkan dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, termasuk tata ruangnya.

“Penelitian lebih dalam lagi juga akan dilakukan, dan kami akan mengambil langkah-langkah sebagaimana yang harus dilakukan. Ini demi menyelamatkan masyarakat juga lingkungan yang ada di Gunung Tujuh,” ungkapnya.

Rasio mengatakan pihaknya juga akan menelusuri izin yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara. “Sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum,” pungkasnya. ■

(eno.sfi) foto: kresno/hr

RUU PKS Isi Kekosongan Yuridis terhadap Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dibahas Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah. RUU ini untuk mengisi kekosongan yuridis terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menempati posisi tertinggi.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengungkapkan hal itu saat menyampaikan pengantar pembahasan RUU PKS pada rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise, Senin (11/9/2017). Kekerasan terhadap anak, kata Ali, seperti gunung

es yang terus meningkat grafiknya.

“Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi kompleksitas permasalahan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menempati urutan pertama. Bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan. Kasus pedophilia di Indonesia tertinggi di Asia. Dalam kurun waktu yang sangat singkat terjadi peningkatan yang sangat signifikan,” paparnya.

Ali mengemukakan data yang menunjukkan bahwa empat tahun terakhir (2014-2017), kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih 50% dari seluruh kasus kekerasan yang ada. Pada 2014 sebesar 52% dari 4.638 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Pada 2015 sebesar 58% dari 6.726 kasus kekerasan. Pada Januari-April 2016 tercatat 48% kekerasan seksual dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk. 60% kekerasan pada 2016 dilakukan oleh anak di bawah 17 tahun.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati kasus yang paling banyak diadukan, yaitu 903 kasus atau 88% dari total 1.022 kasus yang masuk.

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga dan relasi personal, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama, 5.784 kasus (56%) disusul kekerasan dalam pacaran 171 kasus (21%).

Di ranah rumah tangga dan personal, lanjut Ali lagi, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% dari 4.281 kasus. Diikuti kekerasan seksual (31%) dari 3.495 kasus, kekerasan psikis 14% (1.451 kasus), dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). Untuk KDRT dan personal, perkosaan menempati posisi tertinggi 1.389 kasus diikuti pencabulan 1.266 kasus.

Politisi PAN ini juga menambahkan, masyarakat ternyata lebih banyak mengadu ke sebuah yayasan atau LSM untuk mengadukan nasib kekerasan yang dialaminya. Lembaga negara yang resmi untuk perlindungan anak dan perempuan belum menjadi rujukan utama masyarakat. Ini persoalan serius yang harus dicermati.

“Negara harus mengedepankan kualitas layanan yang ramah pada korban. Petugas juga harus memahami isu dan prinsip layanan yang memulihkan korban dibanding upaya-upaya formalisme kelembagaan,” tandas Ali. Belum tersedianya mekanisme pemulihan dalam makna luas bagi korban juga jadi perhatian selain juga mekanisme untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. ■

(mit,mp), foto:azka/hr

Komisi XI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2018

Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2018 yang nantinya akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Salah satu kesepakatannya yakni proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4%.

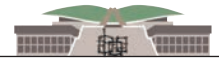
Komisi XI menyepakati empat asumsi dasar ekonomi makro dan empat target pembangunan. “Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Setuju?” kata Ketua Komisi

XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng. “Setuju” jawab seluruh anggota Komisi XI

Selain, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5,4%, laju inflasi juga disepakati sebesar 3,5%, Sedangkan



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng



suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2%. Lalu mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati Rp 13.400 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut menyatakan keyakinannya terkait target pertumbuhan ekonomi 5,4% dapat dicapai meskipun tahun mendatang juga masih terdapat tantangan ekonomi global. "Kami tetap menganggap 5,4 persen itu masih bisa dicapai. Namun memang upayanya ekstra

keras," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin, Jakarta, (11/9/2017)

Menurut Sri Mulyani, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, maka konsumsi harus tumbuh di atas 5 persen. "Pada 2018 mendatang, konsumsi ditargetkan tumbuh 5,1 persen. Sementara itu, dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sendiri ditargetkan tumbuh 6,3 persen pada tahun depan," terangnya.

Untuknya mencapai target pertumbuhan tersebut memerlukan upaya keras pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Memang butuh kebijakan dan tindakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi, karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen adalah investasi yang tumbuh di atas 6 persen dan daya beli yang dijaga sehingga konsumsi rumah tangga bisa di atas 5 persen," tutupnya. ■

(hs/sc), Foto:andri/hr

Menpora Harus Lakukan Terobosan Untuk Tingkatkan Prestasi Atlet

Hasil kurang memuaskan yang diperoleh tim atlet Indonesia pada Sea Games 2017 di Malaysia menjadi salah satu pembahasan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senin (11/09/2017). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) mengevaluasi perolehan medali yang masih jauh dari target.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

yang dilakukan lawan terhadap atlet Indonesia, akibatnya atlet kita dirugikan dan peluang medali hilang, ungkap salah satu Menteri Termuda tersebut.

Meskipun menerima penjelasan dari Menpora, Sutan meminta kepada pemerintah beserta para pihak yang terkait untuk melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan prestasi Indonesia di ajang multi even lain ke depannya. "Dalam menghadapi Asian Games Jakarta nanti saya minta Menpora, KOI, Satlak Prima dan Cabor memperkuat koordinasi melahirkan terobosan meningkatkan prestasi Indonesia di mata dunia," ujarnya.

Terobosan ini menurut SAH harus

bertumpu pada pembinaan yang tepat, target yang tepat, prioritas cabor yang tepat, program pelatihan yang tepat, hingga dukungan administrasi keuangan yang handal. Karena dalam catatan DPR, titik lemah dalam pembinaan olahraga di tanah air ada pada ego sektoral pelaku olahraga itu sendiri, seperti Satlak prima merasa paling berotoritas, cabor tak mau menerima masukan dan Menpora pun terlalu kaku dalam menerjemahkan aturan keuangan.

Muara dari berbagai ego sektoral ini yang jadi korban adalah atlet, seperti kasus atlet tolak peluru Eki Febri yang harus membayar akomodasi sendiri selama pelatnas. "Kasus Eki Febri saja menunjukkan ada masalah dalam koordinasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu melakukan terobosan yang cukup radikal dan berani," tandasnya. ■

(dep/mp) Foto : Arnel/hr

“Kita prihatin Indonesia hanya mampu meraih 38 medali dari target 55 medali emas yang ditetapkan, maka dalam rapat ini kita minta saudara Menpora menjelaskan hasil evaluasi kementerianannya akan hal itu,” tegas Sutan.

Dalam penjelasannya Menpora Imam Nahrawi mengatakan, hancurnya prestasi Indonesia di Sea Games Malaysia tidak terlepas dari berbagai praktek kecurangan



<https://img.okezone.com>

Ngeri-Ngeri Sedap, Catatan Kritis Ketua Komisi III DPR



Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di sela-sela peluncuran bukunya 'Ngeri-Ngeri Sedap'



Kalimat “ngeri-ngeri sedap” sangat relevan dan kontekstual dengan situasi terkini. Kita bisa melihat bahwa presiden dan para Menteri terus menunjukkan kerja keras, membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Demikian diungkapkan Politisi kawakan Golkar Bambang Soesatyo di sela-sela peluncuran bukunya “Ngeri-Ngeri Sedap” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR ini menilai gerak langkah pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi pada saat bersamaan juga terdengar suara ketidakpuasan dari sejumlah elemen masyarakat.

“Kita cemas dan prihatin karena tiba-tiba persoalan SARA muncul lagi. Kita terhenyak karena elemen anti Pancasila ternyata eksis dalam masyarakat kita. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat pun kembali dibuat bingung karena ada SARACEN yang menjadi spesialis penggoreng isu SARA dan ujaran kebencian,” ungkap legislator yang akrab disapa Bamsuet ini.

Bamsuet yang hari itu juga tengah merayakan hari lahirnya ke-55, melihat kebhinekaan atau keberagaman Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup serius. Elemen-elemen masyarakat yang intoleran sudah terang-terangan menyuarakan aspirasinya melalui berbagai instrumen media sosial. Masalah ini cukup serius sehingga kita bisa melihat bahwa baik Presiden, Panglima TNI hingga Kapolri Bersama para ulama, harus bersusah payah lagi menggelar dan menghadiri sejumlah forum untuk sekedar mengingatkan semua pihak untuk tidak mengingkari kodrat keberagaman Indonesia.

Di bidang penegakan hukum, banyak pejabat serta penegak hukum yang tertangkap karena kasus korupsi. Mulai dari kalangan politisi, pemimpin daerah, pejabat pajak, auditor BPK, jaksa hingga hakim dijera Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2017, KPK sedikitnya telah menangani 600 kasus korupsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 319 kasus merupakan upaya penyuaipan terhadap pejabat negara.

“Pejabat negara tingkat eselon I/II/III yang terjerat korupsi sebanyak 145 orang, 127 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) tertangkap

korupsi, sebanyak 60 pejabat Walikota/Bupati dan Wakil serta ada 6 jaksa juga terciduk KPK,” ujar Bamsuet membeberkan data-datanya.

Lebih lanjut, legislator Dapil Jateng VII ini mencatat kurun waktu 5 tahun terakhir sedikitnya 12 hakim yang terjerat kasus suap terkait penanganan perkara. Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada tahun 2013 hingga hakim MK Patrialis Akbar di tahun 2017 karena dugaan suap terkait uji materi undang-undang. Citra korps hakim kian terpuruk, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan pun merosot sangat tajam.

“Kerusakan parah di dunia peradilan ini tidak mudah untuk diperbaiki. Faktanya tadi merefleksikan makna dari kata ‘ngeri-ngeri’ pada judul buku ini,” kata Bamsuet saat membuka diskusi.

Di sisi lain, pemerintahan era Jokowi yang bekerja keras membangun ragam infrastruktur di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera serta melengkapi juga infrastruktur di Jawa dan Jakarta. Jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, jembatan 16.246 m atau 160 jembatan, rel kereta api sepanjang 450,83 km spoor, 47 pelabuhan non komersil untuk tol laut serta 41 pelabuhan lain yang sedang dalam tahap pembangunan. Gambaran kinerja pemerintah itulah yang merefleksikan makna kata “sedap” pada buku ini, terang Bamsuet.

“Kita masih punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki berbagai kekurangan. Jika semua potensi bangsa ini bersatu tanpa ada kegaduhan dari ‘Kuningan’, ‘Senayan’, ‘Trunojoyo’ maupun dari ‘Blok M’, saya yakin ekonomi kita akan maju pesat dan beban hutang Rp 13 juta per kepala bagi warga Indonesia tentu akan berkurang. Bahkan diharapkan tercapai jaminan hidup sejahtera, pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis, serta sandang pangan disubsidi,” pungkas Bamsuet optimis. ■

(ojie.mp), foto: Naefurroji/hr

BURT Tinjau Layanan Kesehatan Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung layanan jaminan kesehatan utama (Jamkestama) bagi para anggota dewan di Ciputra Mitra Hospital, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (8/9/2017). Fasilitas dan layanan kesehatan VVIP mendapat perhatian khusus.



Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau fasilitas RS Ciputra Mitra Hospital, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kunjungan spesifik BURT dipimpin langsung oleh Ketua BURT Anthon Sihombing dan anggota BURT lainnya. Pada kunjungannya, delegasi BURT berdialog dengan Direktur rumah Sakit Irwan Susanto Hermawan. “Kami ingin melihat layanan Jamkestama di setiap rumah sakit provider yang kerap belum menerapkan standar VVIP untuk anggota dewan dan keluarganya,” kata Anton dalam sambutannya.

Layanan yang kerap kurang memadai bagi pasien VVIP biasanya karena sosialisasi yang kurang masif dilakukan. Di sinilah, ujar Anton, pentingnya meninjau rumah sakit provider, sejauh mana kesiapan layanan Jamkestama di setiap rumah sakit penyedia Jamkestama dari Jasindo.

Umumnya, lanjut Anthon, keluhan para anggota dewan atas layanan ini adalah petugas resepsionis rumah sakit tak mengenal program Jamkestama, sehingga para anggota dewan dan keluarganya tidak segera mendapat layanan VVIP.

Anggota BURT Indah Kurnia, Fauzih Amro, dan Refrizal yang ikut hadir bertemu dengan Direktur Ciputra Mitra Hospital berharap agar nama-nama para anggota dewan dan keluarganya sudah tersedia secara lengkap di resepsionis rumah sakit. Database pasien VVIP harus selalu ada sesuai yang diberikan Jasindo. ■

(mh/sf), Foto: husen/hr

Komisi IX Beri Waktu 2 Hari Menkes Usut Kasus Debora

Bayi berumur empat bulan Tiara Deborah Simanjong meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di RS Mitra keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Bayi malang tersebut meninggal karena pihak rumah sakit menolak merawat di ruang PICU karena uang kedua orangtua bayi tidak cukup.

Atas kasus tersebut Komisi IX mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dalam rapat kerja di ruang sidang Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Melalui pimpinan rapat Ketua Komisi IX Dede Yusuf

M. Efendi. Menkes diberi waktu dua hari agar menyelesaikan masalah ini, jika melampaui batas waktu yang diberikan tidak selesai maka Komisi IX akan memanggil semua pemangku kepentingan.

“Apabila dalam waktu 2X24 jam tidak terselesaikan maka akan memanggil

semua stakeholder. Untuk itu saya sampaikan kepada para anggota apakah kita bisa menerima statement tersebut?” tanya Dede, lalu dijawab para anggota “setuju,” ketuk palu menandai pergantian pembahasan masalah.

Dalam keterangannya, Nila menyampaikan kepada para awak media, jika berdasarkan hasil tim investigasi, RS Mitra Keluarga Kalideres dinyatakan bersalah maka Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, mulai dari ringan hingga berat. Menurutnya semua sanksi tergantung hasil investigasi yang dilakukan.

Senada dengan permintaan



DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam 'Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay

“Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, melainkan masyarakat tetap membayar. Hanya saja yang membayar adalah negara. “Anggaran untuk kesehatan itu sekitar Rp 34 triliun. Jadi, kalau RS Mitra Keluarga mengembalikan uang pasien karena sudah dibayar BPJS itu patut dipertanyakan,” tegas politisi PAN itu saat diskusi forum

legislasi bertema 'Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?' bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Sebab, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan. Yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial. Dokter kata politisi PAN itu sudah

menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya. ■

(sc), Foto : runi/hr



Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. Efendi berdialog dengan Menkes

Komisi IX, dia memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada tim investigasi untuk melakukan penyelidikan. “Jadi tim investigasi dalam waktu 2x24 jam akan melaporkan kepada kami,” untkannya.

Nila menjelaskan, sanksi itu bertahap, teguran lisan, kemudian teguran keras, ketiga pencabutan izin rumah sakit. Lebih lanjut dia memaparkan, pihak rumah sakit juga bisa mendapatkan sanksi pidana bila kelalaian yang dilakukan menyebabkan kecacatan atau meninggal dunia. ■

(eko/sc), Foto : runi/hr

Gula Tersana Baru Aman Konsumsi Tak Seharusnya Disegel



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menegaskan, gula petani asal Cirebon yang di produksi Pabrik Gula (PG) Tersana Baru milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Rajawali Nusantara Indonesia II layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Edhy menyayangkan tindakan Pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap 5300 ton produk gula Tersana Baru. “Permasalahannya hanya warnanya yang berubah dan ICUMSA (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis) yang melebihi 300. Tapi setelah dilakukan uji oleh Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM), hasilnya aman untuk dikonsumsi,” tegas Edhy di Gudang PG Tersana Baru, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (7/9/2017).

Maka dari itu, pihaknya segera meminta Penyidik Kementerian Perdagangan untuk membuka segel tersebut dengan catatan dilakukan reproduksi kembali agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Mereka melakukan penyegelan karena gula tidak memenuhi SNI, kami menghormati itu untuk melindungi konsumen. Namun apakah sebahaya itu sampai disegel? Padahal gula tersebut tidak mengandung zat berbahaya, hanya warnanya saja yang berubah. Maka setelah segel ini dibuka kita minta dilakukan reproduksi kembali,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menilai hal ini bukan permasalahan luar biasa, hingga sampai dilakukan penyegelan. Menurutnya, ini hanya karena komunikasi antara pemerintah dengan BUMN yang buruk.

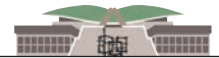
“Kami kesini membantu mengkomunikasikan antara BUMN dengan pemerintahan untuk menyatukan visi. Sebenarnya ini

bukan permasalahan luar biasa sampai dilakukan penyegelan, hanya karena buruknya komunikasi anatar ke dua pihak ini saja,” tandasnya, dengan harapan permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi, karena korban penyegelan ini tidak lain adalah petani.

Ditempat yang sama Direktur Utama PT. Rajawali II, Audry Jolly Lopian yang mendampingi Komisi IV DPR menjelaskan bahwa mereka sudah menyanggupi akan melakukan reproduksi gula yang disegel oleh Kementerian Perdagangan.

“Reproduksi akan dilakukan pada empat pabrik gula kami. Kalau dilakukan di sini, 11 ribu ton waktunya akan lama, sehingga akan dibantu pabrik kami di Subang dan Jati Tujuh,” jelas Audry. ■

(rnm.sf), Foto: ria/hr



Komisi V Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Bandara Abreso

Mengingat seringkali terkendala dalam masalah take off dan landing pesawat di Bandara Rendani Manokwari, Pemerintah Daerah dan masyarakat Manokwari Selatan (Mansel) beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap ada pembangunan bandara baru sebagai alternatif.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Manokwari Selatan Michael Wattimena.

“Seperti yang kita alami tadi, ketika tidak bisa landing di Bandara Rendani, maka seluruh penerbangan diarahkan ke bandara yang ada di Sorong atau ke Biak. Sementara hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Dengan adanya pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Manokwari Selatan melalui Bupati, dapat menjadi alternatif yang paling sejuk, dimana jarak tempuh dari Rendani Manokwari ke Abreso Manokwari Selatan,

waktunya tidak lebih dari lima belas menit,” jelas Michael usai melakukan peletakan batu pertama rencana pembangunan Bandara Abreso di Manokwari Selatan, Papua Barat, Jum’at (08/9/2017).

Menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, namun Bandara Abreso nantinya juga bisa mengurangi terjadinya penumpukan penumpang di bandara yang telah ada sebelumnya, yakni Bandara Rendani Kabupaten Manokwari.

“Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama oleh anggota DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan, serta tokoh adat yang telah

memberikan tanahnya untuk pembangunan bandara, dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ucapnya.

Masyarakat dan Pemda berharap agar pembangunan Bandara Abreso itu dapat dilakukan secepat mungkin, lanjut Michael, tetapi soal limitasi berapa waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian, hal itu akan tergantung juga dengan perjuangan dan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami juga sempat mengunjungi Pelabuhan Laut Oransbari. Dari sisi pelabuhan maupun area dari pelabuhan itu sendiri, minimal sudah dapat memenuhi bongkar muat kapal yang nantinya akan diarahkan ke Manokwari Selatan. Hanya ada persoalan menyangkut aksesibilitas jalan yang menuju pelabuhan laut tersebut, dan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan dan pelebaran akses jalan yang menuju ke Pelabuhan Oransbari.

Terkait dengan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Michael menyatakan bahwa jalan yang ada tersebut sudah relatif mantap. Hanya saja dari aspek kelebaran jalan, ukurannya masih jalan kabupaten yaitu 4 meter. Sementara persyaratan untuk memenuhi jalan nasional harus 6 meter lebarnya. “Harapan ke depan setelah kami kembali dari kunjungan ini, akan ada perubahan-perubahan yang didapatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan,” ujar politisi F-Demokrat itu.

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran juga sempat menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk menjawab kesenjangan konektivitas antar wilayah di Manokwari Raya, karena Kabupaten Manokwari Selatan terletak diantara Kabupaten/Kota yang ada di Manokwari Raya.

“Dari Bintuni, Pegunungan Arfak dan Wondama menuju Ibukota Provinsi Manokwari akan melewati Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga kami berharap dengan adanya beberapa infrastruktur yang akan kami bangun, terutama bandara, bisa menjawab kebutuhan dan kesenjangan yang selama ini terjadi,” ucap Markus Waran. ■



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena melakukan peletakan batu pertama rencana pembangunan Bandara Abreso di Manokwari Selatan, Papua Barat

(dep/psc) Foto: Ryan Dephr.

Parlemen Myanmar Konsultasikan Perlindungan Perempuan dan Anak

Delegasi Parlemen Myanmar bertemu dan saling tukar pendapat dengan Komisi VIII DPR yang membidangi masalah Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk tukar pikiran mengenai Sosialisasi dan pelaksanaan UU Perlindungan anak dan perempuan, pasalnya, baru-baru ini, Parlemen Myanmar baru saja mengesahkan UU Perlindungan anak dan perempuan Myanmar.



Wakil Ketua Komisi VIII Noor achmad, serta beberapa anggota Komisi VIII DPR saat menerima Delegasi Parlemen Myanmar

efektivitas UU diberlakukan di tengah masyarakat.

“Di Indonesia ada tujuh UU yang mengatur perlindungan anak. Sementara yang mengatur perlindungan perempuan ada sepuluh UU,” jelas Sodik. Ditambahkannya, DPR punya fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan UU. Bila UU itu menyangkut perlindungan anak, maka pengawasannya sangat berlapis. Dimulai dari pengawasan anggaran dan regulasi terhadap perlindungan

anak.

Pengawasan juga, sambung politisi Gerindra ini, bisa dilakukan lewat kunjungan kerja ke daerah dan rapat kerja dengan menteri terkait bila ada temuan menarik soal anak. Selain itu, pengawasan bisa juga dilakukan dengan Panitia Kerja (Panja) yang khusus mengawasi persoalan tertentu. Terakhir, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga resmi pemerintah yang khusus memberi perlindungan kepada anak-anak Indonesia.

Mendengar penjelasan tersebut, Parlemen Myanmar sangat antusias untuk belajar dari Indonesia bagaimana

membangun mekanisme pengawasan terhadap perlindungan anak. Berbagai pertanyaan terlontar untuk menggali lebih banyak soal perlindungan anak di Indonesia. Anggota Komisi VIII Syamsu Niang menambahkan bahwa di setiap kabupaten di Indonesia ada satu sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, bahkan kota ramah anak.

Endang Maria Astuti yang ikut dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan, ada kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga membentengi perempuan dan anak-anak dari aksi kriminalitas, prostitusi, dan perdagangan orang. Di setiap kabupaten/kota ada P2TP2A, kata Endang.

Sodik kembali memaparkan, kini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diawali dengan terbitnya Perppu. Hukuman bagi para pedofil dan yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ditambah. Misalnya, yang semula hukuman terendah 15 tahun menjadi 20 tahun. Hukuman 20 tahun menjadi hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup juga ditambah menjadi hukuman mati.

Usia anak juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Sama seperti Indonesia, usia 16 tahun di Myanmar kini diubah menjadi 18 tahun. Di Indonesia usia 18 tahun, sudah bukan anak-anak lagi. Bahkan, bila anak-anak yang masih di bawah umur melanggar UU, dia tetap bisa dihukum dengan hukuman setimpal lewat pengadilan ramah anak. ■

(mth), Foto : Azka/hr

“Parlemen Myanmar ingin belajar banyak dari DPR, bagaimana menyukseskan pelaksanaan sebuah UU, khususnya perlindungan anak dan perempuan,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid.

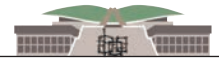
Pada kesempatan itu, Delegasi Parlemen Myanmar dipimpin oleh Mya Thaug, diterima Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dan Noor Achmad, serta beberapa anggota Komisi VIII lainnya.

Kepada delegasi Parlemen Myanmar, Sodik menjelaskan, UU yang sudah disahkan dipantau oleh DPR melalui kunjungan kerja ke setiap daerah untuk melihat sejauhmana informasi dan

BKSAP Bawa Resolusi Myanmar ke Sidang AIPA di Filipina

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar ke Sidang Asean Inter - Parliamentary Assembly yang akan diselenggarakan pada 15 -19 September 2017 di Filipina.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kejahatan kemanusiaan di Myanmar harus dihentikan. Karena itu, dalam resolusi yang akan diusung, DPR RI meminta AIPA membentuk tim ad hoc dari anggota parlemen negara Asean.



Menurutnya, tim inilah yang akan proaktif mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. “Jadi itu resolusi yang kita perjuangkan nanti dan akan dipimpin langsung Watua DPR Fadli Zon,” papar Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Selain itu, melalui diplomasi parlemen, Nurhayati yang juga selaku Presiden International Humanitarian Law mendorong semua parlemen negara yang tergabung dalam IPU untuk ikut membantu menyelesaikan bencana kemanusiaan atau etnis cleansing Rohingya.

“Kita khawatir jika konflik ini tidak kita cegah maka bisa menjadi konflik regional.

Jangan dianggap konflik ini, hanya konflik Myanmar. Karena itu, meskipun mereka jauh dan tidak terlibat langsung, tetapi parlemen semua negara harus ikut membantu bagaimana menyelesaikan ini. Ikut membantu pemikiran, memberikan bantuan dan membantu pencegahan terulangnya kembali kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Nurhayati.

Nurhayati menambahkan dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian.

“Insyaallah, kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing, artinya ini tidak bisa dibiarkan,” katanya. ■



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

BK DPR Terima Delegasi Parlemen Myanmar

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR Johnson Rajagukguk di Komplek Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/9) menerima kunjungan Delegasi Parlemen Myanmar. Maksud kehadiran mereka dalam rangka diskusi dan bertukar pikiran serta menimba pengamalan dengan DPR-RI khususnya BKD terkait pemantauan pelaksanaan Undang-undang.



Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menerima delegasi parlemen Myanmar

Kepala BKD yang didampingi Kepala Pusat Perancangan UU Insensius Samsul dan Kepala Pusat Penelitian dan Pemantauan Pelaksanaan UU Indra Pahlevi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya DPR memerlukan system pendukung. Pendukung teknis dilakukan oleh Setjen sementara dukungan keahlian

dilakukan oleh Badan Keahlian yang baru dibentuk pada tahun 2015 lalu.

Pemantauan pelaksanaan UU kata Johnson bisa dilakukan melihat pelaksanaan UU sudah sesuai peraturan pelaksanaannya (PP) sebab perintah UU juga m e n e g a s k a n

perluanya dibentuk PP 1 atau 2 tahun setelah UU disahkan.

Sedangkan secara sosiologis, pemantauan pelaksanaan UU dengan melihat bagaimana UU dilaksanakan oleh aparat dan kepada masyarakat juga dilihat bagaimana ketaatan dalam pelaksanaan UU dimaksud. Dengan pantauan ini lanjut Johnson, kalau ditemukan ada permasalahannya maka bisa diajukan

rekomendasi untuk dilakukan perubahan. “Manakala diperlukan sosialisasi, maka bisa diserahkan kepada Komisi atau Pansus, juga kepada Baleg,” jelasnya.

Berbeda dengan DPR, Delegasi Parlemen Myanmar menyebutkan bahwa untuk melaksanakan UU tidak mesti ada PP dan banyak UU dijalankan tanpa PP. Diakui bahwa negaranya baru mempraktekkan kehidupan demokrasi mulai tahun 2010 lalu dan pemerintahannya masih diwarnai rezim militer.

Mereka juga mengaku belum bisa memantau adanya peraturan pembatasan anak bekerja dibawah 14 tahun, lantaran disuruh orang tuanya keterbatasan ekonominya. “Jangankan untuk memantau, untuk mensosialisasikan UU saja belum bisa,” katanya.

Menanggapi manfaat apakah yang dirasakan masyarakat, Johnson menjelaskan pemantauan UU juga dilakukan oleh anggota DPR yang sudah melekat dengan tugas pokoknya. Bagi masyarakat, pemantauan pelaksanaan UU sangat dirasakan khususnya bagi masyarakat di daerah pemilihannya sebab yang diperjuangkan adalah pelaksanaan UU yang mestinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan pemantauan, selain anggota komisi, badan juga dibantu oleh para tenaga ahli (TA) yang tiap-tiap anggota memiliki 5 TA dan 2 orang staf. Di BK DPR ada 73 orang TA, 48 orang tenaga perancang UU dan analisis hukum serta analisis APBN seluruhnya berjumlah sekitar 200 orang. ■

DPR Desak Pemerintah Kerahkan Sumber Daya Diplomasi Hentikan Tragedi Myanmar

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan, pemerintah Indonesia perlu mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam diplomasi untuk menghentikan tragedi pembersihan etnis di Myanmar. Tidak hanya etnis muslim, etnis non muslim juga ikut terusir dalam peristiwa serangan-serangan militer ke Rakhine.



Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari saat diskusi tentang Rohingya

“Pemerintah harus menaikkan tekanan pada militer Myanmar untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan pengusiran massal,” kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Hadir mendampingi Eva, Mahfud Siddiq (FPKS), Hengky Kurniadi (FPDIP), Moh. Yaqut (FPKB) dan Ketua TPF PBB Marzuki Darusman.

Ia menjelaskan, bahwa tidak ada etnis Rohingya yang dapat menduduki posisi-posisi strategis di Myanmar. Kondisi tersebut menimbulkan tanda-tanya besar. “Tidak ada etnis Rohingya yang menduduki posisi strategis di Myanmar,” kata Eva.

Tragedi yang dialami oleh etnis Rohingya dan muncul ke permukaan belakangan ini diduga sebagai cara untuk menghapuskan suatu kelompok manusia di Myanmar. “Tampaknya ini strategi

bumi hangus ini ada problem naturalisasi di sana,” lanjut Eva. “Yang aneh lagi, mau mengambil tikus kok yang dibakar rumahnya,” sambung Eva.

Yang menjadi perbincangan dunia belakangan terkait Rohingya, kata Eva, bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Menurut Eva, kejadian tersebut sudah terindikasi sejak tahun 1978. “Prakonsisinya sudah sejak tahun 1978,” kata Eva lagi.

Bahkan, Eva menduga Aung San Suu Kyi terkesan berpihak pada kebijakan militer negara tersebut. “Aung San Suu Kyi mendukung kebijakan militer yang di sana,” ujarnya.

Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menilai, posisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat ini masih kalah berkuasa dibanding militer. Di Rakhine State, Partai Arakan yang menjadi oposisi Suu Kyi memiliki kekuatan mayoritas. Menurut

Mahfudz, perlu ada upaya bahu membahu untuk memberi dukungan pada Suu Kyi. “Harus ada dukungan bagaimana Suu Kyi bisa menjalankan rekomendasi Dewan HAM PBB,” ujarnya.

Mahfudz mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi tidak mempunyai kewenangan yang mutlak di negara wilayah Rakhine. Tentunya kondisi itu tidak memungkinkan bagi Suu Kyi untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi yang telah menjulangkan namanya.

“Aung San Suu Kyi tidak punya kontrol yang penuh di Rakhine state. Itu menunjukkan fakta tambahan, mulai dibawa main politik, kekuatan militer dan kekuatan politik lokal,” kata Mahfudz.

Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Marzuki Darusman mengatakan kejahatan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar khususnya terhadap warga muslim Rohingnya itu sudah berlangsung selama 15 tahun yang lalu. Hanya, dalam 2 tahun terakhir ini sebagai puncaknya.

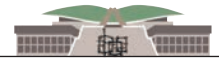
Karena itu PBB mengutus pembentukan TPF HAM PBB untuk mengetahui lebih jauh peristiwa tersebut. Sehingga nantinya bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi apa-apa yang bisa dilakukan oleh PBB.

“Selama 15 tahun ini sudah 4 orang di dunia yang lapor ke PBB. Untuk itu PBB mendesak pembentukan TPF, dan saya sebagai Ketua TPF. Jadi, saya ini mewakili PBB dan bukan mewakili Indonesia,” tegas Marzuki Darusman.

Marzuki yang juga mantan komisioner Komnas HAM itu menegaskan jika berita dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi selama ini tak bisa dijadikan kesimpulan. Karena itu pula katanya, peristiwa dan berita-berita tersebut tak bisa dijadikan pangkal analisa TPF. Mengapa? “Mengingat masalahnya sangat kompleks. Makanya diterjunkan TPF HAM PBB ini untuk mengetahui lebih jauh dan pasti tentang peristiwa Rohingnya itu,” ujarnya.

Mantan Keagung RI itu mengatakan jika TPF HAM PBB memiliki waktu sampai Maret 2018 mendatang. Sebagai petugas PBB, Marzuki sendiri mengakui jika tidak memiliki kepentingan sebagai warga Indonesia terhadap tragedi Rohingnya tersebut. ■

(sc), Foto : Ojfe/hr



Penyelesaian Kekerasan Rohingya Harus Kedepankan Aspek Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, dalam penyelesaian kekerasan kepada etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, harus mengedepankan aspek kemanusiaan. Mengingat, kekerasan kepada etnis ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia.

“Ini adalah kemanusiaan. Masyarakat etnis Rohingya adalah manusia, sehingga terlepas dari agama atau suku apapun, mereka adalah manusia. Secara UU internasional yang diakui PBB, semua manusia berhak mendapatkan hidup sesuai dengan hak asasinya,” tegas Dave, disela-sela rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dave tak memungkiri, bahwa ini kondisi dalam negeri Myanmar sendiri. Sehingga, secara aturan setiap negara

dilarang mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Myanmar pun merupakan negara berdaulat dan diakui oleh seluruh dunia. Namun, sebagai anggota komunitas dunia, Indonesia dan negara-negara lain bisa melakukan pendekatan secara diplomatik.

“Kita mendorong etnis Rohingya mendapat pengakuan resmi secara negara mereka. Mereka juga bisa mendapatkan bantuan, agar mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman,” harap politisi F-PG itu. Dave juga memastikan, pihaknya



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno

menyuarakan isu ini diberbagai kesempatan forum-forum parlemen internasional. Termasuk salah satunya dalam kesempatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali, baru-baru ini. Termasuk kedepannya dalam sidang General Assembly di PBB.

“Kasus ini jangan diseret ke masalah agama. Yang harus kita dorong, kita adalah sesama manusia, dan mereka wajib mendapatkan perlakuan yang layak,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■

(st/mp), Foto: Azka/hr

Parlemen Myanmar Temui Komisi XI DPR

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengharapkan kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR RI dapat memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Myanmar. Saat ini, kita akui hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan maraknya pemberitaan negatif terkait Rohingya.

“Kami merasa senang dan terima kasih karena dikunjungi Parlemen Myanmar. Ini suatu kunjungan kehormatan yang dilakukan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih baik,” ujar Mekeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kunjungan Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaug bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang DPR pada umumnya dan Komisi XI pada khususnya.

Dihadapan Parlemen Myanmar, Mekeng memaparkan sejumlah penjelasan tentang DPR dari berbagai sisi. “Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang tetap dan jumlah anggotanya diputuskan dalam rapat paripurna, selain itu DPR juga memiliki 3 fungsi yakni pengawasan, legislasi dan



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng

anggaran,” tutur Mekeng.

“Kita juga melakukan fit and proper test terhadap anggota BPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan

Dewan Komisiner OJK,” sambung Mekeng.

Politisi Golkar ini juga memaparkan tentang berbagai jenis rapat di DPR yang diantaranya yakni rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum. “Di DPR ada berbagai jenis rapat yakni raker, RDP, RDPU ataupun rapat kerja gabungan komisi apabila pembahasannya lebih dari satu bidang komisi. DPR juga melakukan kunker untuk mendalami permasalahan di daerah,” terang Mekeng.

Kesempatan ini, kemudian dimanfaatkan oleh anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari untuk menyampaikan surat terbuka untuk Parlemen Myanmar untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya. “Ini surat ditandatangani 27 anggota DPR yang tadi pagi dimobilisasi. Harapannya Parlemen Myanmar bisa aktif mendorong pemerintah untuk menghentikan pembakaran desa-desa dan kekerasan yang berlangsung di sana. Tidak ada development tanpa peace, konflik harus dihentikan,” tutup Eva. ■

(ns/sc), Foto: Jaka/hr

Organized by:



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



INDONESIA
INTERNATIONAL
BOOK FAIR

6 - 10 SEPTEMBER 2017
JAKARTA CONVENTION

Buletin Parlementaria Raih Penghargaan Perpusnas

IIBF

PEMBERIAN PENGHARGAAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL
UNTUK PENERBIT 2017



“Penghargaan diberikan karena secara aktif dan terus menerus menyerahkan terbitannya, kepada Perpusnas”

KEPALA PERPUSNAS
M. SYARIF BANDO

Kepala Biro Pemberitaan Parleman Diaka Dwi Winarko menerima penghargaan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando



Buletin Parlemen terpilih menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai buletin yang selalu meliput kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat, dan secara rutin terbit periodik seminggu sekali serta selalu dikirimkan atau didistribusikan ke Perpustakaan Nasional. PNRI secara rutin telah memberikan penghargaan kepada penerbit majalah, jurnal, buletin, buku dan grey literature di acara Indonesia Internasional Book Fair.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Djaka Dwi Winarko mewakili tim Penerbitan dan tim Redaksi Parlemen menerima penghargaan secara langsung dari Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando. Djaka menyampaikan sudah menjadi kewajiban bagi lembaga yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan produknya kepada Perpustakaan Nasional. Hal ini senada dengan keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

“Ini salah satu bentuk penghargaan, pengakuan kepada lembaga kita, kepada Buletin Parlemen. Kita mendapat penghargaan nomor satu untuk kategori buletin,” ujar Djaka di Assembly Hall JCC Senayan, Jakarta, Ahad (10/9/2017).

Menurutnya selain sebagai kepatuhan pada undang-undang, menyerahkan karya cetak untuk disimpan di Perpustakaan Nasional juga penting sehingga peristiwa-peristiwa di DPR terdokumentasi dengan baik.

“Selain melaksanakan undang-undang ini bagus juga karena ini karya-karya kita,

peristiwa-peristiwa yang kita rekam setiap hari di Buletin Parlemen, adalah perjalanan dari perlemen kita, kinerja anggota dewan. Itu akan terekam akan tersimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional. Sehingga suatu saat nanti, apabila diperlukan untuk penulisan atau penelitian itu bisa kita buka,” papar Djaka.

Kepala PNRI, Muhammad Syarif Bando menyampaikan, penghargaan yang diberikan kepada penerbit majalah, jurnal, buletin, buku dan grey literature ini, karena secara aktif dan terus menerus menyerahkan terbitannya kepada Perpustakaan Nasional. Hal ini bertujuan untuk pelestarian budaya, pendayagunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia, karena Perpustakaan Nasional juga diakses oleh kurang lebih 138 negara.

“Semua terbitan karya cetak, karya rekam yang pernah dihasilkan anak bangsa tersimpan di Perpustakaan Nasional. Tujuannya adalah pelestarian budaya, pendayagunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang pernah ada,” jelas Syarif. ■

(eko/sc) foto:andri/hr


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

• SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA •
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT serta
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

TURUT BERDUKA CITA
 yang sedalam-dalamnya atas wafatnya



Ir. H. Azhar Romli, M.Si.

Anggota Komisi IV DPR RI
 Fraksi Partai Golkar
 Dapil Bangka Belitung
 Kamis, 14 September 2017

Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan YME
 dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan ketabahan



Wakil Ketua DPR Korpolkam, Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR mengunjungi Kampung Kebun Bayam terkait rencana Pemda DKI yang akan menggusur Kampung tersebut, Rabu (13/09). Foto: Rumi



Raker Banggar DPR dengan empat Menko Kabinet Kerja Joko Widodo dipimpin Ketua Aziz Syamsuddin membahas RKA K/L dalam APBN TA. 2018, Rabu (13/9). Foto Andri



Raker Komisi XI DPR dengan Bappenas, BPS, dan LKPP dipimpin Ketua Melchias Marcus Mekeng membahas rencana utang Indonesia yang akan diambil dalam RAPBN 2018, Rabu (13/9). Foto: Jaka